DINAMIKA POLITIK PEMEKARAN DAERAH OTONOM BARU KABUPATEN MUSI BANYUASIN WILAYAH TIMUR DALAM PERSPEKTIF POLITIK LOKAL

Abdi Dharma A Rianda
NPP. 33.0216
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: abdidharmaar@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Heru Rochamsjah, S.H., M.Si.
Email: heru_rochmansjah@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *This study is motivated by a research gap in the literature on regional proliferation, which has predominantly focused on administrative, institutional, and post-proliferation development aspects, while studies examining political dynamics during the advocacy stage of establishing a new autonomous region remain limited. In addition, there is an evidence gap regarding the dominant factors influencing regional proliferation, particularly whether the process is primarily driven by public service improvement and equitable development needs or by the interests of local political elites.* ***Purpose:*** *Therefore, this study aims to analyze the political dynamics of the proposed East Musi Banyuasin New Autonomous Region from the perspective of local politics.* ***Method:*** *This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. Informants were selected using purposive sampling and consisted of members of the East Musi Banyuasin Regional Proliferation Presidium, officials of the Musi Banyuasin Regency Government, the National Unity and Political Agency of Musi Banyuasin Regency, and community leaders involved in the regional proliferation advocacy process. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, using Vilfredo Pareto's Elite Circulation Theory as the analytical framework.* ***Results/Findings:*** *The findings reveal that the political dynamics of the proposed East Musi Banyuasin Autonomous Region are characterized by the consolidation of non-governing elites through the Proliferation Presidium, the response of governing elites that tends to emphasize formal and institutional considerations, and the process of elite circulation manifested through contestation, negotiation, and efforts to gain political legitimacy in advancing the regional proliferation agenda.* ***Conclusion:*** *In conclusion, the proposed East Musi Banyuasin New Autonomous Region serves as an arena of elite circulation that demonstrates the interaction between non-governing elites and governing elites in competing for, maintaining, and redistributing political influence at the local level.*

Keywords: *East Musi Banyuasin, Elite Circulation, Local Politics, New Autonomous Region, Political Dynamics.*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait kajian pemekaran daerah yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek administratif, kelembagaan, dan dampak pascapemekaran, sementara kajian mengenai dinamika politik pada tahap advokasi pembentukan daerah otonom baru masih relatif terbatas. Selain itu, terdapat perbedaan hasil

penelitian (*evidence gap*) mengenai faktor yang paling dominan memengaruhi proses pemekaran daerah, apakah didorong oleh kebutuhan peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan atau oleh kepentingan *elite* politik lokal. **Tujuan:** Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur dalam perspektif politik lokal. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri atas unsur Presidium Pemekaran Daerah Otonom Baru Musi Banyuasin Timur, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses advokasi pemekaran daerah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan Teori Sirkulasi *Elite* Vilfredo Pareto sebagai pisau analisis. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur ditandai oleh konsolidasi *elite* non-penguasa melalui Presidium Pemekaran, respons *elite* penguasa yang cenderung mengedepankan aspek formal dan kelembagaan, serta terjadinya proses sirkulasi *elite* melalui kontestasi, negosiasi, dan upaya memperoleh legitimasi politik dalam memperjuangkan agenda pemekaran daerah. **Kesimpulan:** Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur merupakan arena sirkulasi *elite* yang memperlihatkan interaksi antara *elite* non-penguasa dan *elite* penguasa dalam memperebutkan, mempertahankan, serta mendistribusikan pengaruh politik di tingkat lokal.

Kata kunci: Daerah Otonom Baru, Dinamika Politik, Musi Banyuasin Wilayah Timur, Politik Lokal, Sirkulasi *Elite*.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desentralisasi merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (Faguet, 2014; Smoke, 2015). Dalam konteks Indonesia, implementasi desentralisasi telah mendorong munculnya berbagai tuntutan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan akses pelayanan publik, khususnya pada wilayah yang memiliki kendala geografis maupun ketimpangan pembangunan dengan daerah induknya (Ihwandi & Khoirunurrofik, 2023; Firman, 2009).

Pemekaran daerah pada dasarnya dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran tidak hanya didorong oleh pertimbangan administratif dan pelayanan publik, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik lokal, relasi kekuasaan, serta kepentingan *elite* yang terlibat dalam proses pembentukan daerah baru (Aspinall & Berenschot, 2021; Hadiz, 2004). Dalam banyak kasus, pemekaran daerah menjadi arena kontestasi berbagai aktor politik yang berupaya mempertahankan maupun memperluas pengaruh politiknya di tingkat lokal (Mietzner & Aspinall, 2019).

Dinamika tersebut juga terlihat pada usulan pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur yang telah diperjuangkan selama lebih dari satu dekade. Aspirasi pemekaran muncul akibat luasnya wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, tingginya jarak pelayanan publik dari wilayah timur menuju pusat pemerintahan kabupaten, serta adanya harapan masyarakat untuk memperoleh pemerataan pembangunan yang lebih optimal. Di sisi lain, proses advokasi pemekaran juga memperlihatkan adanya interaksi yang kompleks antara pemerintah daerah, DPRD,

presidium pemekaran, tokoh masyarakat, dan aktor politik lokal lainnya yang memiliki kepentingan berbeda terhadap agenda pembentukan DOB (Tarigan, 2022a).

Selain menghadapi dinamika politik lokal, usulan pemekaran Musi Banyuasin Wilayah Timur juga dihadapkan pada kebijakan moratorium pemekaran daerah yang masih diberlakukan oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadikan proses pemekaran tidak hanya bergantung pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan para aktor lokal dalam membangun dukungan politik, melakukan negosiasi kepentingan, serta mempertahankan legitimasi aspirasi masyarakat di tengah berbagai keterbatasan regulasi yang berlaku (Hadiz, 2010).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai dinamika politik pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur menjadi penting dilakukan untuk memahami bagaimana konfigurasi kekuasaan, relasi antar-*elite*, dan kontestasi politik lokal memengaruhi proses advokasi pemekaran daerah. Pemahaman tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian politik lokal dan pemekaran daerah di Indonesia, khususnya dalam menjelaskan proses pembentukan daerah otonom baru dari perspektif relasi kekuasaan dan sirkulasi *elite* politik.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian mengenai pemekaran daerah dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) telah banyak dilakukan dalam perspektif administrasi publik, desentralisasi, maupun pembangunan daerah. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek normatif dan administratif, seperti persyaratan pembentukan daerah, dampak pemekaran terhadap kualitas pelayanan publik, kinerja pemerintahan, serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi daerah. Penelitian (Smoke, 2015) menunjukkan bahwa desentralisasi dan pembentukan unit pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat berpotensi meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memperkuat kapasitas pemerintahan lokal. Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Firman, 209) yang menyatakan bahwa reformasi desentralisasi di Indonesia mendorong peningkatan fleksibilitas pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada dimensi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, sehingga belum banyak menjelaskan bagaimana dinamika politik lokal memengaruhi proses perjuangan pembentukan daerah otonom baru.

Di sisi lain, sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa proses pemekaran daerah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen pemerataan pembangunan, melainkan juga sebagai arena kontestasi kepentingan politik di tingkat lokal. Penelitian (Hadiz, 2004) dan (Aspinall & Berenschot, 2021) menemukan bahwa desentralisasi telah melahirkan konfigurasi kekuasaan baru yang memungkinkan *elite* lokal memainkan peran dominan dalam proses pengambilan keputusan daerah. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa berbagai agenda pemekaran daerah di Indonesia sering kali diwarnai oleh persaingan kepentingan antaraktor politik lokal yang berupaya mempertahankan maupun memperluas pengaruh politiknya. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih lebih banyak membahas fenomena kontestasi *elite* secara umum dan belum secara spesifik mengkaji proses advokasi pembentukan daerah otonom baru yang masih berada pada tahap perjuangan politik sebelum memperoleh legitimasi formal dari pemerintah pusat.

Pada konteks nasional, kajian mengenai pemekaran daerah juga masih didominasi oleh penelitian yang berorientasi pada evaluasi kebijakan dan dampak pascapemekaran. Penelitian (Ihwandi & Khoirunurrofik, 2023) menunjukkan bahwa pemekaran daerah diharapkan mampu memperbaiki akses pelayanan publik dan mempercepat pembangunan wilayah. Selain itu, penelitian (Pitono, 2020) menjelaskan bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam era desentralisasi sangat dipengaruhi oleh interaksi antara institusi formal dan aktor politik lokal. Penelitian (Tarigan, 2022b) juga menegaskan bahwa politik lokal menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan daerah, terutama pada isu-isu strategis yang melibatkan kepentingan masyarakat dan *elite* pemerintahan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara

mendalam menjelaskan bagaimana relasi, negosiasi, dan kontestasi antar-*elite* lokal berlangsung dalam proses advokasi pembentukan DOB yang masih terhambat oleh kebijakan moratorium pemekaran daerah.

Selain itu, penelitian mengenai pemekaran daerah di Indonesia umumnya lebih banyak dilakukan pada daerah yang telah berhasil menjadi daerah otonom baru, sehingga kajian terhadap wilayah yang masih berada pada tahap perjuangan pemekaran relatif terbatas. Padahal, fase advokasi sebelum pembentukan DOB merupakan tahapan yang penting karena menjadi arena interaksi antara *elite* penguasa (*governing elite*), *elite* non-penguasa (*non-governing elite*), organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan maupun merespons tuntutan pemekaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan kajian yang menjelaskan pemekaran daerah dari perspektif politik lokal dan sirkulasi *elite*, khususnya pada daerah yang belum memperoleh status sebagai daerah otonom baru.

Selain kesenjangan penelitian (*research gap*), terdapat pula kesenjangan temuan (*evidence gap*) dalam kajian pemekaran daerah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemekaran daerah pada dasarnya didorong oleh kebutuhan peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan upaya memperpendek rentang kendali pemerintahan. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pembentukan daerah otonom baru dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memperkuat kapasitas pemerintahan lokal dalam merespons kebutuhan masyarakat (Ihwandi & Khoirunurrofik, 2023; Smoke, 2015). Namun, hasil penelitian lain menunjukkan temuan yang berbeda. Beberapa studi menemukan bahwa proses pemekaran daerah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan *elite* politik lokal yang berupaya memperluas akses terhadap kekuasaan, sumber daya politik, maupun posisi strategis dalam struktur pemerintahan daerah (Aspinall & Berenschot, 2021; Hadiz, 2004; Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perdebatan akademik mengenai faktor dominan yang mendorong pemekaran daerah, apakah lebih berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan atau justru lebih dipengaruhi oleh dinamika kepentingan *elite* politik lokal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan bagaimana kedua faktor tersebut berinteraksi dalam proses advokasi pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur.

Berdasarkan kondisi tersebut, kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara spesifik menganalisis dinamika politik pemekaran daerah otonom baru pada tahap advokasi dengan menggunakan perspektif politik lokal dan teori sirkulasi *elite*. Selain itu, terdapat kesenjangan temuan (*evidence gap*) mengenai faktor dominan yang mendorong pemekaran daerah. Sebagian penelitian menekankan bahwa pemekaran daerah didorong oleh kebutuhan peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan (Ihwandi & Khoirunurrofik, 2023; Smoke, 2015), sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa kepentingan dan kontestasi *elite* politik lokal menjadi faktor yang lebih dominan dalam proses pemekaran daerah (Aspinall & Berenschot, 2021; Hadiz, 2004). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana interaksi antara *elite* penguasa dan *elite* non-penguasa membentuk dinamika perjuangan pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi kekuasaan, kontestasi kepentingan, dan proses sirkulasi *elite* dalam agenda pembentukan daerah otonom baru.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai dinamika politik pemekaran daerah otonom baru menjadi penting dilakukan mengingat pemekaran daerah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen administratif untuk mendekatkan pelayanan publik, tetapi juga sebagai proses politik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan di tingkat lokal. Dalam konteks desentralisasi, interaksi antara pemerintah daerah, DPRD, kelompok masyarakat, dan *elite* politik lokal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan maupun kegagalan suatu agenda pemekaran daerah (Aspinall & Berenschot, 2021; Hadiz, 2004). Oleh karena itu, pemahaman mengenai dinamika politik yang

berkembang dalam proses advokasi pemekaran menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan, kepentingan, dan pengaruh politik bekerja dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Secara akademik, penelitian ini memiliki urgensi untuk memperkaya kajian politik lokal dan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pemekaran daerah dalam perspektif sirkulasi *elite*. Berbagai penelitian selama ini lebih banyak berfokus pada aspek administratif, fiskal, dan dampak pembangunan pascapemekaran, sementara kajian mengenai proses politik yang terjadi sebelum terbentuknya daerah otonom baru masih relatif terbatas (Smoke, 2015). Padahal, fase advokasi pemekaran merupakan tahapan yang penting karena memperlihatkan bagaimana relasi antara *elite* penguasa dan *elite* non-penguasa terbentuk, berkompetisi, serta memengaruhi arah kebijakan daerah. Dalam konteks tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian politik lokal, khususnya dalam menjelaskan fenomena pemekaran daerah dari perspektif relasi kekuasaan dan sirkulasi *elite*.

Dari sisi empiris, urgensi penelitian ini terletak pada masih berlangsungnya perjuangan pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur yang hingga saat ini belum terealisasi meskipun aspirasi pemekaran telah diperjuangkan dalam waktu yang cukup panjang. Apabila dinamika politik yang melatarbelakangi proses tersebut tidak dipahami secara komprehensif, maka berbagai faktor yang memengaruhi keberlanjutan agenda pemekaran berpotensi tidak teridentifikasi secara tepat. Kondisi ini dapat menyebabkan pemahaman yang kurang utuh mengenai hubungan antara aspirasi masyarakat, kepentingan *elite* lokal, dan kebijakan pemerintah dalam proses pembentukan daerah otonom baru.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, DPRD, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dinamika politik yang terjadi dalam proses pemekaran daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademik maupun praktis dalam mendukung pengembangan kajian politik lokal dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di era desentralisasi.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kajian terdahulu yang membahas pemekaran daerah, politik lokal, desentralisasi, serta peran *elite* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemekaran daerah merupakan fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan pelayanan publik, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik, relasi kekuasaan, serta kepentingan berbagai aktor yang terlibat dalam proses pembentukannya.

Penelitian mengkaji hubungan antara otonomi daerah dan politik lokal di Indonesia dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi telah menciptakan ruang politik yang lebih luas bagi aktor lokal untuk memengaruhi proses pengambilan kebijakan daerah. Penelitian (Aspinall & Berenschot, 2021) juga menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan bahwa berbagai kebijakan strategis di tingkat daerah sering kali dipengaruhi oleh hubungan patronase, jaringan politik, serta kepentingan *elite* lokal yang berupaya mempertahankan maupun memperluas pengaruh politiknya.

Selanjutnya, penelitian (Ihwandi & Khoirunurrofik, 2023) menganalisis pemekaran daerah dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran daerah pada dasarnya ditujukan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Temuan serupa dikemukakan oleh (Smoke, 2015) yang menyatakan bahwa desentralisasi dan pembentukan unit pemerintahan baru berpotensi meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan apabila

didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai. Namun demikian, kedua penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek tata kelola pemerintahan dan belum mengkaji secara mendalam dinamika politik yang terjadi dalam proses perjuangan pembentukan daerah baru.

Dalam perspektif politik lokal, penelitian (Hadiz, 2004) menjelaskan bahwa desentralisasi telah menghasilkan konfigurasi kekuasaan baru di tingkat daerah yang ditandai oleh meningkatnya peran *elite* lokal dalam menentukan arah kebijakan publik. Penelitian (Firman, 2009) juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor lokal dalam membangun konsensus politik dan mengelola kepentingan yang beragam. Agenda pemekaran daerah sering kali menjadi arena kontestasi *elite* yang melibatkan proses negosiasi, koalisi, serta persaingan pengaruh antaraktor politik lokal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses pemekaran daerah tidak dapat dilepaskan dari dinamika relasi kekuasaan yang berkembang di tingkat lokal.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar kajian mengenai pemekaran daerah masih berfokus pada aspek administratif, tata kelola pemerintahan, dan dampak pembangunan pascapemekaran. Selain itu, kajian mengenai politik lokal lebih banyak membahas peran *elite* dalam proses desentralisasi secara umum tanpa secara khusus mengkaji dinamika politik yang terjadi pada tahap advokasi pembentukan daerah otonom baru. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi penelitian terdahulu dengan menganalisis dinamika politik pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur melalui perspektif politik lokal dan teori sirkulasi *elite*, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi kekuasaan dan kontestasi kepentingan yang berkembang dalam proses perjuangan pembentukan daerah otonom baru.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan bahwa seluruh penelitian menempatkan desentralisasi, politik lokal, dan pemekaran daerah sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengakui adanya pengaruh aktor politik dalam proses pengambilan kebijakan daerah (Aspinall & Berenschot, 2021; Hadiz, 2004). Namun demikian, terdapat perbedaan fokus kajian pada masing-masing penelitian. Sebagian penelitian lebih menekankan aspek administratif, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan pelayanan publik sebagai tujuan utama pemekaran daerah (Ihwandi & Khoirunurrofik, 2023; Smoke, 2015), sedangkan penelitian lainnya lebih menyoroti peran *elite* politik, relasi kekuasaan, dan kontestasi kepentingan dalam dinamika politik lokal (Aspinall & Berenschot, 2021). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena lebih berfokus pada dampak desentralisasi atau evaluasi daerah yang telah dimekarkan, serta belum secara spesifik mengkaji dinamika politik pada tahap advokasi pembentukan daerah otonom baru yang masih dalam proses perjuangan. Selain itu, kajian yang menggunakan perspektif Teori Sirkulasi *Elite* untuk menjelaskan hubungan antara *elite* penguasa dan *elite* non-penguasa dalam agenda pemekaran daerah juga masih relatif terbatas. Oleh karena itu, posisi penelitian ini adalah melengkapi penelitian terdahulu dengan menganalisis dinamika politik pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur pada tahap advokasi melalui perspektif politik lokal dan Teori Sirkulasi *Elite*, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relasi kekuasaan, kontestasi kepentingan, serta proses sirkulasi *elite* dalam perjuangan pembentukan daerah otonom baru.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (novelty) yang terletak pada aspek objek kajian, perspektif teoritis, dan fokus analisis yang digunakan dalam memahami fenomena pemekaran daerah. Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang lebih banyak mengkaji dampak pemekaran setelah terbentuknya daerah otonom baru atau mengevaluasi aspek administratif dan kelembagaan pemekaran daerah, penelitian ini secara khusus menganalisis dinamika politik pada tahap advokasi pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur yang hingga saat ini belum terealisasi. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada proses politik sebelum terbentuknya daerah otonom baru, yang masih relatif terbatas dikaji dalam literatur politik lokal dan pemerintahan daerah.

Kebaruan teoritis penelitian ini terletak pada penggunaan Teori Sirkulasi *Elite* Vilfredo Pareto sebagai perspektif utama untuk menjelaskan dinamika pemekaran daerah. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana interaksi antara *elite* penguasa (*governing elite*) dan *elite* non-penguasa (*non-governing elite*) berlangsung dalam proses advokasi pemekaran daerah. Melalui perspektif ini, pemekaran daerah tidak hanya dipahami sebagai proses administratif dan kebijakan publik, tetapi juga sebagai arena kontestasi, negosiasi, serta reproduksi kekuasaan yang melibatkan berbagai aktor politik lokal.

Selain itu, kebaruan analitis penelitian ini terletak pada upaya menjelaskan hubungan antara konsolidasi *elite* non-penguasa yang diwakili oleh Presidium Pemekaran dengan respons *elite* penguasa yang berada dalam struktur pemerintahan formal. Penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan pembentukan daerah otonom baru berlangsung melalui proses sirkulasi *elite* yang ditandai oleh upaya memperoleh legitimasi politik, membangun dukungan masyarakat, mempertahankan kewenangan, serta memengaruhi arah kebijakan daerah. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian politik lokal dengan menunjukkan bahwa keberhasilan atau keberlanjutan agenda pemekaran daerah tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi dan persyaratan administratif, tetapi juga oleh dinamika relasi kekuasaan antara *governing elite* dan *non-governing elite* dalam sistem politik lokal.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan analitis terhadap pengembangan kajian politik lokal, desentralisasi, dan pemekaran daerah, khususnya dalam menjelaskan proses advokasi pembentukan daerah otonom baru melalui perspektif sirkulasi *elite* pada daerah yang masih berada dalam tahap perjuangan pemekaran.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur dalam perspektif politik lokal.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam dinamika politik yang terjadi dalam proses advokasi pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relasi kekuasaan, pola interaksi antaraktor, serta proses kontestasi politik yang berkembang dalam perjuangan pembentukan daerah otonom baru (Creswell & Creswell, 2023). Penggunaan metode deskriptif juga dinilai relevan karena penelitian berupaya

menggambarkan fenomena politik lokal secara sistematis berdasarkan fakta dan kondisi empiris yang terjadi di lapangan (Pitono, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan tingkat keterlibatan, pengetahuan, dan peran mereka dalam proses advokasi pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur. Informan penelitian terdiri atas unsur Presidium Pemekaran Daerah Otonom Baru Musi Banyuasin Timur, pejabat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pemekaran daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah daerah, arsip organisasi, berita media massa, serta berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan agenda pemekaran daerah.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki posisi dan kepentingan yang berbeda terhadap agenda pemekaran daerah. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan tingkat kewenangan, pengalaman, keterlibatan langsung, serta penguasaan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Unsur Presidium Pemekaran Daerah Otonom Baru Musi Banyuasin Wilayah Timur dipilih karena merupakan aktor utama yang menginisiasi, mengoordinasikan, dan mengadvokasi agenda pemekaran daerah sehingga memiliki pemahaman yang mendalam mengenai proses perjuangan pembentukan daerah otonom baru. Pejabat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dipilih karena memiliki kewenangan administratif dan peran strategis dalam merespons aspirasi pemekaran serta memahami aspek kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah yang berkaitan dengan usulan pemekaran. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dipilih karena memiliki tugas dalam memantau dinamika politik daerah, menjaga stabilitas politik, serta memahami berbagai interaksi dan kepentingan politik yang berkembang dalam proses advokasi pemekaran. Sementara itu, tokoh masyarakat dipilih karena memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam menyuarakan aspirasi masyarakat serta memahami persepsi dan dukungan publik terhadap agenda pembentukan daerah otonom baru. Dengan karakteristik tersebut, para informan dinilai mampu memberikan informasi yang komprehensif dan relevan mengenai dinamika politik pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles et al. (2020). Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi dan pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan identifikasi pola hubungan antaraktor dan dinamika yang terjadi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Analisis tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan Teori Sirkulasi *Elite* Vilfredo Pareto untuk menjelaskan interaksi antara *elite* penguasa (*governing elite*) dan *elite* non-penguasa (*non-governing elite*) dalam dinamika politik pemekaran daerah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan wilayah induk dari usulan Daerah Otonom Baru Musi Banyuasin Wilayah Timur. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama bulan Januari sampai dengan April 2026, yang meliputi tahap persiapan penelitian, pengumpulan data lapangan, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansi wilayah

tersebut dengan fokus penelitian, mengingat Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur merupakan salah satu wilayah yang hingga saat ini masih memperjuangkan pembentukan daerah otonom baru melalui berbagai proses advokasi politik di tingkat lokal maupun regional.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika politik pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur merupakan fenomena yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, sumber daya, dan posisi kekuasaan yang berbeda dalam memperjuangkan maupun merespons agenda pemekaran daerah. Proses pemekaran tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga mencerminkan adanya interaksi, negosiasi, dan kontestasi kepentingan antara berbagai aktor politik lokal yang terlibat. Dalam konteks tersebut, dinamika politik pemekaran menjadi arena yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan dipertahankan, diperjuangkan, dan didistribusikan di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan selama penelitian, ditemukan bahwa dinamika politik pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur tidak dapat dilepaskan dari peran *elite* lokal yang terdiri atas *elite* penguasa (*governing elite*) dan *elite* non-penguasa (*non-governing elite*). Kedua kelompok *elite* tersebut memiliki kepentingan dan strategi yang berbeda dalam menyikapi agenda pembentukan daerah otonom baru. Interaksi yang terjadi di antara mereka membentuk pola hubungan yang dinamis, mulai dari upaya membangun dukungan politik, melakukan negosiasi kepentingan, hingga mempertahankan posisi dan pengaruh dalam struktur kekuasaan lokal.

Untuk memahami fenomena tersebut secara lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan Teori Sirkulasi *Elite* yang dikemukakan oleh Pareto sebagai pisau analisis. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan dan keberlangsungan kekuasaan dalam suatu masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh interaksi antara kelompok *elite* yang sedang berkuasa dan kelompok *elite* yang berupaya memperoleh atau memperluas pengaruhnya. Berdasarkan kerangka tersebut, pembahasan dinamika politik pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur dianalisis melalui beberapa dimensi yang menggambarkan pola hubungan, kontestasi, dan sirkulasi *elite* dalam proses advokasi pemekaran daerah.

3.1 Konsolidasi *Elite* Non-Penguasa dalam Advokasi Pemekaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur pada tahap awal didominasi oleh peran *elite* non-penguasa (*non-governing elite*), yaitu kelompok aktor yang berada di luar struktur kekuasaan formal pemerintahan tetapi memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini publik dan agenda politik daerah. Dalam konteks penelitian ini, peran tersebut dijalankan oleh Presidium Pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur yang menjadi motor utama dalam memperjuangkan aspirasi pembentukan daerah otonom baru.

Konsolidasi yang dilakukan Presidium tidak hanya berfokus pada penggalangan dukungan masyarakat, tetapi juga mencakup pembangunan jaringan politik dengan tokoh masyarakat, tokoh politik, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pihak yang memiliki pengaruh terhadap proses pemekaran. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, audiensi, dan advokasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, Presidium berupaya membangun legitimasi bahwa pemekaran merupakan kebutuhan masyarakat wilayah timur Kabupaten Musi Banyuasin. Strategi tersebut menunjukkan bahwa *elite* non-penguasa tidak hanya berperan sebagai penyampai aspirasi

masyarakat, tetapi juga sebagai aktor politik yang mampu mengorganisasi dukungan kolektif untuk memperkuat posisi tawar agenda pemekaran.

Berdasarkan perspektif Teori Sirkulasi *Elite* Pareto, kelompok Presidium dapat dikategorikan sebagai *elite* tipe *foxes* yang mengandalkan kemampuan persuasi, negosiasi, komunikasi politik, dan pembentukan koalisi dalam memperjuangkan kepentingannya. Berbeda dengan *elite* penguasa yang memiliki kewenangan formal dalam proses pengambilan keputusan, Presidium lebih banyak menggunakan pendekatan advokasi dan mobilisasi dukungan untuk memperoleh legitimasi politik. Melalui strategi tersebut, Presidium berhasil menjaga keberlanjutan isu pemekaran dalam ruang publik meskipun dihadapkan pada berbagai kendala regulasi maupun kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan Presidium dalam mempertahankan eksistensi agenda pemekaran selama bertahun-tahun tidak terlepas dari kemampuannya membangun kesamaan persepsi di antara masyarakat wilayah timur Kabupaten Musi Banyuasin mengenai pentingnya pembentukan daerah otonom baru. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekuatan *elite* non-penguasa tidak selalu bersumber dari kewenangan formal, melainkan dari kemampuan membangun dukungan sosial dan politik yang luas. Dengan demikian, konsolidasi *elite* non-penguasa menjadi salah satu faktor penting yang menjelaskan mengapa aspirasi pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur tetap bertahan dan terus diperjuangkan hingga saat ini meskipun belum memperoleh legitimasi formal sebagai daerah otonom baru.

Tabel 1.
Tabel Ringkasan Temuan

Aspek	Aktor Utama	Posisi *Elite*	Karakter *Elite* Pareto	Strategi Utama	Sasaran Konsolidasi	Tujuan	Hasil
Temuan Penelitian	Presidium Pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur	*Elite* Non-Penguasa (*Non-Governing Elite*)	*Foxes*	Advokasi, persuasi, negosiasi, dan mobilisasi dukungan	Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh politik, organisasi kemasyarakatan	Memperkuat legitimasi dan dukungan terhadap agenda pemekaran	Aspirasi pemekaran tetap terjaga dan diperjuangkan secara berkelanjutan

Sumber: diolah oleh penulis (2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa konsolidasi yang dilakukan oleh Presidium Pemekaran tidak hanya merupakan bentuk penyaluran aspirasi masyarakat, tetapi juga mencerminkan strategi politik *elite* non-penguasa untuk meningkatkan posisi tawar dalam struktur kekuasaan lokal. Dalam perspektif Teori Sirkulasi *Elite* Pareto, kelompok *elite* yang berada di luar lingkaran kekuasaan formal cenderung berupaya memperoleh pengaruh melalui pembentukan jaringan, mobilisasi dukungan, dan penciptaan legitimasi sosial. Oleh karena itu, advokasi pemekaran dapat dipahami sebagai instrumen politik yang digunakan untuk memperkuat akses *elite* non-penguasa terhadap proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa agenda pemekaran tidak sepenuhnya bersifat administratif, melainkan juga menjadi ruang strategis bagi *elite* lokal untuk membangun basis dukungan politik yang dapat dimanfaatkan dalam konfigurasi kekuasaan daerah di masa mendatang.

3.2 Peran *Elite* Penguasa dalam Merespons Agenda Pemekaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur tidak hanya dipengaruhi oleh upaya konsolidasi *elite* non-penguasa, tetapi juga oleh sikap dan respons *elite* penguasa (*governing elite*) yang memiliki kewenangan formal dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks penelitian ini, *elite* penguasa terdiri atas unsur pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang secara administratif dan politis memiliki peran penting dalam menentukan keberlanjutan usulan pemekaran daerah. Keberadaan kelompok ini menjadi sangat strategis karena persetujuan pemerintah daerah dan DPRD merupakan salah satu prasyarat utama dalam proses pembentukan daerah otonom baru.

Berdasarkan hasil penelitian, *elite* penguasa cenderung menunjukkan sikap yang lebih hati-hati dalam merespons tuntutan pemekaran. Sikap tersebut dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, baik yang bersifat administratif, regulatif, maupun politik. Dari aspek regulasi, keberadaan kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat menjadi alasan utama yang sering dikemukakan oleh pemerintah daerah dalam menyikapi tuntutan pemekaran. Kondisi tersebut menyebabkan dukungan terhadap agenda pemekaran tidak dapat diwujudkan secara langsung meskipun aspirasi masyarakat telah berkembang dalam waktu yang cukup lama.

Dalam perspektif Teori Sirkulasi *Elite* Pareto, kelompok *elite* penguasa dapat dikategorikan sebagai *elite* tipe *lions*, yaitu kelompok yang cenderung mempertahankan stabilitas, kewenangan, dan tatanan yang telah ada. Karakteristik tersebut terlihat dari kecenderungan pemerintah daerah dan DPRD untuk menempatkan aspek legalitas, prosedur, dan kepastian regulasi sebagai dasar utama dalam merespons agenda pemekaran. Berbeda dengan *elite* non-penguasa yang menggunakan pendekatan persuasi dan mobilisasi dukungan, *elite* penguasa lebih menekankan pada mekanisme formal dan pertimbangan kelembagaan dalam proses pengambilan keputusan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa posisi *elite* penguasa berada pada situasi yang kompleks karena harus menyeimbangkan antara aspirasi masyarakat wilayah timur dengan tanggung jawab menjaga stabilitas pemerintahan daerah secara keseluruhan. Di satu sisi, terdapat tuntutan untuk mendukung aspirasi pemekaran sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan konsekuensi administratif, fiskal, dan politik yang mungkin muncul apabila proses pemekaran direalisasikan. Kondisi tersebut menjadikan *elite* penguasa tidak sepenuhnya berada pada posisi mendukung ataupun menolak, melainkan lebih berperan sebagai aktor yang mengendalikan arah dan ritme proses pemekaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, peran *elite* penguasa dalam dinamika politik pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur menunjukkan bahwa proses pembentukan daerah otonom baru tidak hanya bergantung pada kuatnya dukungan masyarakat dan *elite* non-penguasa, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap, kewenangan, dan pertimbangan strategis *elite* yang berada dalam struktur pemerintahan formal. Oleh karena itu, *elite* penguasa menjadi salah satu aktor kunci yang menentukan keberlanjutan agenda pemekaran dalam sistem politik lokal.

Tabel 2.
Tabel Ringkasan Temuan

Aspek	Aktor Utama	Posisi *Elite*	Karakter *Elite* Pareto	Strategi Utama	Pertimbangan Utama	Peran dalam Pemekaran	Temuan Utama
Temuan Penelitian	Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	*Elite* Penguasa (*Governing Elite*)	*Lions*	Pendekatan formal, legalitas, dan prosedur kelembagaan	Moratorium pemekaran, regulasi, stabilitas pemerintahan, dan aspek administratif	Mengendalikan dan menentukan keberlanjutan proses pemekaran	Sikap *elite* penguasa cenderung hati-hati dan berorientasi pada stabilitas kelembagaan

Sumber: diolah oleh penulis (2026)

Dari perspektif politik lokal, sikap hati-hati yang ditunjukkan oleh *elite* penguasa tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan upaya mempertahankan stabilitas dan distribusi kekuasaan yang telah terbentuk. Teori Sirkulasi *Elite* Pareto menjelaskan bahwa *elite* yang sedang berkuasa cenderung mempertahankan posisinya dengan mengendalikan proses-proses politik yang berpotensi mengubah struktur kekuasaan yang ada. Dalam konteks pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur, pembentukan daerah otonom baru berpotensi menciptakan pusat-pusat kekuasaan baru yang dapat mengurangi pengaruh *elite* yang berada dalam pemerintahan daerah induk. Oleh karena itu, respons *elite* penguasa dapat dipahami tidak hanya sebagai pertimbangan administratif dan kelembagaan, tetapi juga sebagai bentuk strategi politik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta mengendalikan potensi perubahan konfigurasi politik lokal.

3.3 Sirkulasi *Elite* dalam Dinamika Politik Pemekaran Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur merupakan arena interaksi yang memperlihatkan proses sirkulasi *elite* sebagaimana dijelaskan dalam Teori Sirkulasi *Elite* Vilfredo Pareto. Sirkulasi *elite* terjadi melalui hubungan yang dinamis antara *elite* non-penguasa yang memperjuangkan agenda pemekaran dengan *elite* penguasa yang memiliki kewenangan formal dalam menentukan arah kebijakan daerah. Interaksi tersebut tidak hanya ditandai oleh adanya perbedaan kepentingan, tetapi juga melalui berbagai proses negosiasi, adaptasi, dan upaya memperoleh pengaruh dalam ruang politik lokal.

Berdasarkan hasil penelitian, proses sirkulasi *elite* terlihat dari kemampuan *elite* non-penguasa untuk membangun posisi tawar politik melalui konsolidasi dukungan masyarakat, tokoh politik, dan berbagai kelompok kepentingan lainnya. Dukungan tersebut kemudian digunakan sebagai instrumen untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan yang berada dalam kendali *elite* penguasa. Dalam konteks ini, agenda pemekaran tidak hanya menjadi tuntutan administratif, tetapi juga berkembang menjadi isu politik yang mampu menarik perhatian berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap konfigurasi kekuasaan di masa mendatang.

Penelitian juga menemukan bahwa kontestasi antara *elite* non-penguasa dan *elite* penguasa tidak selalu berlangsung dalam bentuk konflik terbuka. Sebaliknya, hubungan yang terbangun lebih banyak diwujudkan melalui proses negosiasi dan komunikasi politik yang dilakukan secara berkelanjutan. *Elite* non-penguasa berupaya memperoleh dukungan politik melalui pendekatan persuasif, sedangkan *elite* penguasa mempertahankan kewenangannya melalui mekanisme formal dan prosedural yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses sirkulasi *elite* berlangsung

secara gradual melalui kompetisi pengaruh dan legitimasi politik, bukan melalui pergantian kekuasaan yang bersifat langsung.

Selain itu, agenda pemekaran juga membuka peluang munculnya *elite-elite* baru yang berpotensi memperoleh posisi strategis apabila daerah otonom baru berhasil dibentuk. Potensi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong keterlibatan berbagai aktor dalam perjuangan pemekaran. Pembentukan daerah baru tidak hanya berarti terbentuknya struktur pemerintahan baru, tetapi juga menciptakan ruang politik baru yang memungkinkan terjadinya redistribusi kekuasaan dan munculnya aktor-aktor politik baru dalam sistem pemerintahan daerah. Dengan demikian, pemekaran daerah menjadi salah satu mekanisme yang dapat mendorong terjadinya regenerasi dan sirkulasi *elite* di tingkat lokal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika politik pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur pada dasarnya mencerminkan proses sirkulasi *elite* yang berlangsung melalui kontestasi, negosiasi, dan upaya memperoleh legitimasi politik. *Elite* non-penguasa berupaya meningkatkan pengaruhnya melalui advokasi dan mobilisasi dukungan masyarakat, sedangkan *elite* penguasa berusaha mempertahankan stabilitas serta kewenangan yang dimiliki melalui mekanisme formal pemerintahan. Interaksi kedua kelompok tersebut membentuk dinamika politik yang menentukan keberlanjutan agenda pemekaran daerah dan memperlihatkan bagaimana kekuasaan direproduksi, dipertahankan, maupun berpotensi mengalami pergeseran dalam sistem politik lokal.

Tabel 3.
Ringkasan Temuan

Aspek	Bentuk Sirkulasi *Elite*	Aktor yang Terlibat	Mekanisme Utama	Bentuk Kontestasi	Peluang yang Muncul	Dampak terhadap Pemekaran	Temuan Utama
Temuan Penelitian	Kontestasi, negosiasi, dan adaptasi politik	*Elite* Penguasa dan *Elite* Non-Penguasa	Mobilisasi dukungan, komunikasi politik, dan prosedur formal	Persaingan pengaruh dan legitimasi politik	Munculnya *elite* baru dalam struktur pemerintahan daerah	Menentukan keberlanjutan dan arah perjuangan DOB	Pemekaran menjadi arena reproduksi dan pergeseran kekuasaan *elite* lokal

Sumber: diolah oleh penulis (2026)

Lebih jauh, temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran daerah menjadi arena yang memperlihatkan interaksi antara kepentingan pembangunan dan kepentingan politik *elite* secara bersamaan. Meskipun agenda pemekaran sering dikonstruksikan sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan wilayah, proses advokasinya juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan *elite* untuk memperoleh akses terhadap sumber daya politik, jabatan pemerintahan, dan pengaruh dalam struktur kekuasaan baru yang berpotensi terbentuk. Dalam perspektif Pareto, kondisi tersebut mencerminkan proses sirkulasi *elite* yang berlangsung secara gradual melalui kompetisi legitimasi dan pengaruh politik. Dengan demikian, pemekaran daerah tidak hanya merepresentasikan perubahan administratif wilayah, tetapi juga menjadi mekanisme yang memungkinkan terjadinya reproduksi maupun redistribusi kekuasaan di tingkat lokal.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur merupakan hasil interaksi yang kompleks antara kebutuhan pembangunan wilayah, aspirasi masyarakat, dan kepentingan *elite* politik lokal. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa agenda pemekaran tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan administratif dan pelayanan publik, tetapi juga menjadi arena politik yang melibatkan upaya berbagai aktor dalam memperoleh, mempertahankan, dan memperluas pengaruh politiknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemekaran daerah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen desentralisasi dan pemerataan pembangunan, melainkan juga sebagai bagian dari dinamika relasi kekuasaan yang berkembang dalam sistem politik lokal.

Dari perspektif Teori Sirkulasi *Elite* Pareto, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa hubungan antara *elite* penguasa (*governing elite*) dan *elite* non-penguasa (*non-governing elite*) berlangsung melalui proses kontestasi, negosiasi, dan adaptasi politik yang berkelanjutan. *Elite* non-penguasa yang diwakili oleh Presidium Pemekaran berupaya meningkatkan pengaruh politiknya melalui mobilisasi dukungan masyarakat, pembangunan jaringan politik, dan pembentukan legitimasi sosial terhadap agenda pemekaran. Di sisi lain, *elite* penguasa yang terdiri atas pemerintah daerah dan DPRD mempertahankan posisinya melalui penggunaan kewenangan formal, mekanisme kelembagaan, serta pengendalian proses politik sesuai ketentuan yang berlaku. Temuan ini memperkuat argumentasi Pareto bahwa perubahan politik tidak selalu terjadi melalui pergantian kekuasaan secara langsung, tetapi dapat berlangsung melalui proses sirkulasi *elite* yang ditandai oleh persaingan pengaruh dan legitimasi dalam ruang politik.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian politik lokal di Indonesia. Selama ini, banyak penelitian politik lokal lebih berfokus pada pemilihan kepala daerah, relasi patronase, atau dinamika *elite* dalam proses elektoral. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agenda pemekaran daerah juga merupakan arena politik yang memperlihatkan interaksi antara berbagai kelompok *elite* dalam memperjuangkan kepentingan dan pengaruhnya. Dengan demikian, studi ini memperluas pemahaman mengenai politik lokal dengan menunjukkan bahwa proses pembentukan daerah otonom baru merupakan salah satu bentuk manifestasi kontestasi kekuasaan yang terjadi di tingkat daerah.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap studi pemekaran daerah di Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji dampak pemekaran setelah daerah otonom baru terbentuk, baik dari aspek pelayanan publik, pembangunan daerah, maupun tata kelola pemerintahan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada fase advokasi pemekaran yang masih berada pada tahap perjuangan politik sebelum memperoleh legitimasi formal dari pemerintah pusat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan agenda pemekaran tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan persyaratan administratif dan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan aktor-aktor lokal dalam membangun dukungan politik, memperoleh legitimasi masyarakat, serta mengelola hubungan dengan *elite* yang memiliki kewenangan formal dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis, empiris, dan analitis terhadap pengembangan kajian politik lokal dan pemekaran daerah. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi Teori Sirkulasi *Elite* Pareto dalam menjelaskan dinamika kekuasaan pada proses pembentukan daerah otonom baru. Secara empiris, penelitian ini menghadirkan bukti mengenai dinamika politik pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur yang hingga saat ini masih berada dalam tahap advokasi. Sementara itu, secara analitis penelitian ini menunjukkan

bahwa pemekaran daerah merupakan arena yang mempertemukan kepentingan pembangunan, aspirasi masyarakat, dan strategi politik *elite* dalam suatu proses sirkulasi kekuasaan di tingkat lokal.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama mengenai interaksi antara *elite* penguasa dan *elite* non-penguasa dalam proses advokasi pemekaran, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor yang memengaruhi dinamika pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan agenda pemekaran tidak hanya ditentukan oleh relasi *elite*, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek regulasi, sosial, ekonomi, dan politik yang saling berkaitan. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut menjadi hambatan struktural yang menyebabkan proses pemekaran tidak dapat dilanjutkan meskipun berbagai persyaratan administratif telah diupayakan oleh para pengusul. Akibatnya, ruang gerak aktor-aktor lokal dalam memperjuangkan pemekaran menjadi terbatas karena keberhasilan agenda pemekaran tidak hanya bergantung pada dukungan daerah, tetapi juga pada keputusan politik pemerintah pusat.

Faktor lain yang memengaruhi dinamika pemekaran adalah kekuatan jaringan yang dibangun oleh Presidium Pemekaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan perjuangan pemekaran selama bertahun-tahun sangat dipengaruhi oleh kemampuan Presidium dalam membangun komunikasi politik, mengonsolidasikan dukungan masyarakat, serta menjalin hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Jaringan tersebut menjadi sumber legitimasi politik yang penting dalam menjaga eksistensi agenda pemekaran di tengah berbagai keterbatasan regulasi yang ada.

Dukungan tokoh masyarakat juga menjadi faktor yang cukup signifikan. Tokoh masyarakat memiliki posisi strategis karena mampu memengaruhi persepsi publik dan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pembentukan daerah otonom baru. Dukungan yang diberikan tidak hanya memperkuat legitimasi sosial agenda pemekaran, tetapi juga membantu menjaga keberlanjutan aspirasi masyarakat agar tetap menjadi isu yang diperjuangkan dalam ruang politik lokal.

Dari aspek pelayanan publik, luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan jarak yang relatif jauh antara wilayah timur dengan pusat pemerintahan kabupaten menjadi salah satu alasan utama munculnya tuntutan pemekaran. Kondisi geografis tersebut dipersepsikan oleh masyarakat sebagai kendala dalam memperoleh akses pelayanan publik secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemekaran dipandang sebagai alternatif untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa agenda pemekaran membuka peluang munculnya *elite-elite* baru dalam struktur pemerintahan daerah apabila daerah otonom baru berhasil dibentuk. Potensi pembentukan jabatan politik dan birokrasi baru menjadikan pemekaran tidak hanya dipandang sebagai agenda pembangunan daerah, tetapi juga sebagai peluang redistribusi kekuasaan di tingkat lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika pemekaran memiliki dimensi politik yang kuat karena berkaitan dengan peluang akses terhadap sumber daya dan posisi strategis dalam pemerintahan.

Selain itu, kapasitas fiskal daerah menjadi faktor yang turut memengaruhi persepsi berbagai aktor terhadap kelayakan pemekaran. Kemampuan daerah calon otonom baru dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menilai keberlanjutan pemekaran. Oleh karena itu, isu fiskal tidak hanya

menjadi aspek administratif, tetapi juga menjadi bagian dari diskursus politik yang memengaruhi dukungan maupun keraguan terhadap agenda pemekaran.

Dinamika pemekaran juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik lokal yang berkembang di antara berbagai kelompok *elite*. Sebagian aktor melihat pemekaran sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, sementara sebagian lainnya memandang pemekaran sebagai peluang untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih besar dalam struktur kekuasaan daerah. Perbedaan kepentingan tersebut menghasilkan proses negosiasi, kontestasi, dan pembentukan koalisi yang turut membentuk arah perjuangan pemekaran.

Berdasarkan berbagai faktor tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi agenda pemekaran di masyarakat menjadi unsur yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan perjuangan pembentukan daerah otonom baru. Semakin kuat legitimasi yang dimiliki oleh agenda pemekaran, semakin besar pula kemampuan aktor-aktor pendukung untuk mempertahankan isu tersebut dalam agenda politik daerah. Dengan demikian, dinamika pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur merupakan hasil interaksi antara faktor regulasi, jaringan politik, dukungan sosial, kapasitas fiskal, kepentingan *elite*, dan legitimasi masyarakat yang secara bersama-sama memengaruhi arah serta keberlanjutan perjuangan pemekaran daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dinamika politik pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur merupakan proses politik yang melibatkan interaksi antara *elite* non-penguasa dan *elite* penguasa dalam memperjuangkan maupun merespons agenda pemekaran daerah. Dinamika tersebut tercermin melalui upaya konsolidasi yang dilakukan oleh Presidium Pemekaran sebagai representasi *elite* non-penguasa, respons kelembagaan dari pemerintah daerah dan DPRD sebagai *elite* penguasa, serta proses kontestasi dan negosiasi yang berlangsung dalam ruang politik lokal. Dalam perspektif Teori Sirkulasi *Elite* Vilfredo Pareto, fenomena ini menunjukkan bahwa agenda pemekaran tidak hanya berkaitan dengan pembentukan wilayah administratif baru, tetapi juga menjadi arena sirkulasi *elite* yang memperlihatkan upaya memperoleh, mempertahankan, dan mendistribusikan pengaruh politik di tingkat lokal. Dengan demikian, dinamika politik pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur mencerminkan bagaimana relasi kekuasaan dan interaksi antaraktor politik lokal membentuk keberlangsungan perjuangan pembentukan daerah otonom baru.

Implikasi teoritis penelitian ini menunjukkan bahwa Teori Sirkulasi *Elite* Pareto masih relevan digunakan untuk menjelaskan dinamika politik lokal dalam proses pembentukan daerah otonom baru. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa interaksi antara *governing elite* dan *non-governing elite* berlangsung melalui proses kontestasi, negosiasi, dan pembangunan legitimasi politik yang memengaruhi keberlanjutan agenda pemekaran. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian politik lokal dan desentralisasi dengan menunjukkan bahwa pemekaran daerah tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga merupakan arena reproduksi dan sirkulasi kekuasaan di tingkat lokal.

Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kelompok pengusul pemekaran, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan aspirasi pembentukan daerah otonom baru. Pemahaman terhadap dinamika relasi *elite* yang berkembang dalam proses pemekaran dapat membantu para pemangku kepentingan dalam mengelola perbedaan kepentingan, membangun komunikasi politik yang konstruktif, serta menciptakan dukungan publik yang lebih luas terhadap agenda pemekaran daerah.

Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme komunikasi, koordinasi, dan dialog dengan kelompok pengusul pemekaran serta masyarakat untuk memastikan bahwa aspirasi pemekaran tetap tersalurkan secara partisipatif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan moratorium daerah otonom baru dengan mempertimbangkan kesiapan kelembagaan, kapasitas fiskal, kondisi geografis, dan kebutuhan pelayanan publik masyarakat di daerah calon pemekaran. Selain itu, kelompok masyarakat dan Presidium Pemekaran diharapkan terus memperkuat legitimasi agenda pemekaran melalui pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat sehingga perjuangan pemekaran tidak hanya dipandang sebagai kepentingan *elite* politik, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keterbatan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu penelitian hanya difokuskan pada dinamika politik pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik politik, sosial, dan kelembagaan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada perspektif politik lokal dan Teori Sirkulasi *Elite* Vilfredo Pareto, sehingga pembahasan lebih menitikberatkan pada relasi kekuasaan dan interaksi antaraktor politik yang terlibat dalam proses advokasi pemekaran. Penelitian ini juga dibatasi pada analisis terhadap *elite* non-penguasa dan *elite* penguasa yang terlibat dalam agenda pemekaran, sehingga masih terdapat aspek lain di luar penelitian, seperti kapasitas fiskal, kesiapan kelembagaan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta aspek hukum dan administrasi pemerintahan yang berpotensi memengaruhi proses pembentukan daerah otonom baru namun belum dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada dinamika politik pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur dengan menggunakan perspektif Teori Sirkulasi *Elite* Pareto. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif terhadap beberapa calon daerah otonom baru di Indonesia guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pola interaksi antara *elite* penguasa (*governing elite*) dan *elite* non-penguasa (*non-governing elite*) dalam memperjuangkan agenda pemekaran daerah. Pendekatan komparatif tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor politik yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan proses pembentukan daerah otonom baru di berbagai wilayah.

Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji pengaruh kapasitas fiskal daerah terhadap peluang pembentukan daerah otonom baru dengan mengintegrasikan aspek politik, ekonomi, dan kelembagaan secara lebih mendalam. Kajian mengenai kesiapan fiskal menjadi penting karena kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sering kali menjadi salah satu pertimbangan utama dalam evaluasi usulan pemekaran daerah. Penelitian berikutnya juga dapat secara khusus menganalisis peran *elite* lokal dalam proses pembentukan daerah otonom baru melalui perspektif teori *elite*, teori jaringan politik, atau teori tata kelola pemerintahan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai strategi, kepentingan, dan pola relasi kekuasaan yang berkembang dalam dinamika pemekaran daerah.

Di samping itu, penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, baik dari aspek tata kelola pemerintahan,

pemerataan pembangunan, maupun stabilitas politik daerah. Kajian tersebut penting untuk menilai sejauh mana kebijakan moratorium mampu menjawab berbagai permasalahan yang melatarbelakangi pembentukan daerah otonom baru serta memberikan masukan bagi perumusan kebijakan desentralisasi dan penataan daerah di Indonesia pada masa mendatang. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan kajian politik lokal, desentralisasi, dan pemekaran daerah di Indonesia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, Presidium Pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Banyuasin Wilayah Timur, serta seluruh informan yang telah memberikan izin, data, informasi, dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, keluarga, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's democratic paradox: Competitive elections amidst rising illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, 55*(3), 295–317. https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage.

Faguet, J. P. (2014). Decentralization and governance. *World Development, 135*, 105034. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105034

Firman, T. (2009). Decentralization reform and local-government proliferation in Indonesia: Towards a fragmentation of regional development. *Review of Urban & Regional Development Studies, 21*(2–3), 143–157. https://doi.org/10.1111/j.1467-940X.2010.00165.x

Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.

Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives. *Development and Change, 35*(4), 697–718. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x

Ihwandi, L. R., & Khoirunurrofik. (2023). Regional financial performance and inclusive economic development: Empirical evidence from provinces in Indonesia. *Jurnal Bina Praja, 15*(2), 417–429. https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.417-429

Khairi, H. (2021). *Governance dan dinamika pemerintahan daerah dalam era desentralisasi*. IPDN Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage.

Pitono, A. (2020). *Politik lokal dan tata kelola pemerintahan daerah*. IPDN Press.

Pitono, A. (2021). *Metodologi penelitian pemerintahan*. IPDN Press.

Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development, 42*(2), 103–113. https://doi.org/10.1002/pad.1973

Tarigan, M. H. (2022a). *Desentralisasi, kepemimpinan, dan penguatan kelembagaan pemerintahan daerah*. IPDN Press.

Tarigan, M. H. (2022b). *Metode penelitian sosial dan pemerintahan daerah*. IPDN Press.